

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai. Dokumen ini merupakan uraian strategis perencanaan dinas dalam kurun waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini sangat penting karena merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, gambaran pelayanan dinas, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang tersajikan secara spesifik, terukur dan dilengkapi dengan sasaran dan target yang hendak dicapai. Dokumen ini juga disusun untuk menyajikan agenda utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dalam mengatasi persoalan yang belum diselesaikan oleh pemerintahan periode tahun 2011-2016 dan mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul pada masa pemerintahan periode lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021.

Perumusan dokumen RENSTRA ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : *pertama*, menetapkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dalam hal ini juga turut mempertimbangkan perkembangan isu-isu strategis tentang transportasi yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Banggai. *Kedua*, melakukan penjaringan usulan kegiatan yang berasal dari bidang-bidang/sekretariat. *Ketiga*, memformulasikan semua usulan yang masuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk usulan program dan kegiatan. *Keempat*, mensosialisasikannya kembali ke bidang-bidang/sekretariat untuk dipahami agar program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat terarah sesuai dengan perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan dan terlaksana secara sinergis.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai ini telah mengacu pada petunjuk yang ada, tetapi perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam berbagai hal, oleh karenanya diharapkan saran dan koreksi demi kesempurnaan penyusunan RENSTRA yang akan datang.

Luwuk, Oktober 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Drs. TASRIK DJIBRAN
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19631203 199203 1 007

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
SK Kepala Dinas	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	7
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	10
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	11
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	11
3.2 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12
3.3 Telaah Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan RI	13
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	15
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	16
3.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	17
BAB IV Tujuan dan Sasaran	19
4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perhubungan	19
BAB V Strategis dan Arah Kebijakan	21
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	21
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	25
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	26
BAB VIII Penutup	27
Lampiran-Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Struktural	8
Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang	8
Tabel 2.3 Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 2.4 Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Perjenjangan	9
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	10
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	10
Tabel 3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra 2016-2021)	20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Banggai (Sesudah perubahan Renstra 2016-2021).....	20
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sebelum Perubahan Renstra 2016-2021).....	24
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sesudah Perubahan Renstra 2016-2021).....	24
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra 2016-2021)	25
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra 2016-2021)	25
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sebelum Perubahan)	26
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sesudah Perubahan)	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan dalam memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui dukungan sumber-sumber pembiayaan keuangan pemerintahan daerah yaitu APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RENSTRA ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk tetap menjamin konsistensinya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai maka materinya tetap merujuk pada tujuan dan sasaran serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Periode Tahun 2016-2021.

Bahwa RENSTRA perangkat Daerah dilakukan perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016, sebagaimana telah di ubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Periode Tahun 2016-2021. Penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam program dan kegiatan lima tahunan yang bersifat strategis dan akan dilaksanakan sesuai dengan periodisasi dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai menyusun RENSTRA ini untuk periode tahun 2016-2021.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai diperlukan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yang hanya mencakup kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten khusus di bidang perhubungan. Hal ini diperlukan pula sebagai arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tahun anggaran, disamping itu akan sangat penting pula untuk menjadi bahan rujukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas pada setiap akhir tahun anggaran, kemudian dapat menjadi ukuran penilaian

keberhasilan kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, serta menjadi bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai.

Oleh karena itu penyusunan RENSTRA ini sangat diperlukan sehingga secara bertahap dalam periode lima tahun ke depan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai akan lebih terarah, terfokus, tersistem, mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pencapaian tujuan dan sasaran atas pelaksanaan program dan kegiatan serta memudahkan pengukuran kinerja maupun evaluasi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai periode tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Secara hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Periode Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang rencana pembangunan jangka pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah :

1. Mengarahkan perwujudan visi dengan mengemban misi dinas, melakukan terobosan strategis yang dapat mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai khususnya dalam lingkup kewenangan dinas sebagai satuan kerja perangkat daerah.
2. Merencanakan perubahan secara sistematis, terarah dan bertahap dalam lingkungan tugas yang semakin kompleks.

3. Menjadikan RENSTRA sebagai perangkat manajerial dalam pengelolaan tugas dan fungsi dinas yang efektif dan efisien.
4. Menyumbangkan pemikiran (ide/gagasan) yang berorientasi pada masa depan, dengan melibatkan semua stakeholder terkait.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yaitu :

1. Terjabarkannya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dalam suatu indikasi program dan kegiatan strategis yang mendukung pengembangan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai bidang kewenangan.
2. Teridentifikasinya program dan kegiatan strategis sehingga memudahkan dalam menetapkan prioritas serta langkah-langkah pelaksanaannya.
3. Tersedianya suatu rencana strategis yang dapat dijadikan acuan pengelolaan tugas dinas, secara efektif dan efisien, dalam memecahkan permasalahan yang semakin kompleks serta antisipasi tugas lima tahun ke depan.
4. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
- 3.2. Telaah Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan RI
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan
- 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perhubungan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dinas ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara kewenangan / melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan (dari Pemerintah Pusat) yang secara khusus berada dalam ruang lingkup bidang perhubungan dan didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang perhubungan.
2. Penyusunan Program Kegiatan di bidang perhubungan.
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang perhubungan.
4. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan di bidang perhubungan.
5. Pelaksanaan pelayanan jasa perhubungan.
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perhubungan.
7. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
9. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
10. Jabatan fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, dijelaskan secara struktur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
2. Bidang Angkutan Jalan, meliputi :
 - a. Seksi Angkutan Darat
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
 - c. Seksi Pengelolaan Terminal
3. Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa, meliputi :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas
 - c. Seksi Perparkiran
4. Bidang Pelayanan dan Kebandaraan, meliputi :
 - a. Seksi Kepelabuhanan
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
 - c. Seksi Kebandaraan
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
6. Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai mencakup beberapa hal yang merupakan faktor strategis dan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai. Sumber daya tersebut adalah :

1. Unit Kerja pada Lingkup Dinas Perhubungan
Unit kerja dimaksud adalah merupakan induk maupun sub unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yaitu kantor dinas 1 (satu) unit kerja.
2. Sumber Daya Aparatur
Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi kedinasan pada bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan kinerja dinas. Oleh karena itu, kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku aparatur

hendaknya mampu mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai memiliki pegawai negeri sipil yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang, dengan rincian pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	1 orang
3	Eselon III.b	4 orang
4	Eselon IV.a	12 orang
5	Non eselon	56 orang

Subbag Umum & Kepegawaian, 2016

Tabel 2.2
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	Golongan IV	5 orang
2	Golongan III	30 orang
3	Golongan II	25 orang
4	Golongan I	2 orang

Subbag Umum & Kepegawaian, 2016

Tabel 2.3
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata dua (S2)	7 orang
2	Strata satu (S1)	29 orang
3	Diploma III	2 orang
4	SMA	32 orang
5	SMP	1 orang
6	SD	1 orang

Subbag Umum & Kepegawaian, 2016

Tabel 2.4
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	PIM II	1 orang
2	PIM III	1 orang
3	PIM IV	12 orang
4	Prajabatan	61 orang

Subbag Umum & Kepegawaian, 2016

Kondisi ini sebenarnya masih perlu ditingkatkan karena pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai masih membutuhkan ketersediaan tenaga-tenaga teknis di bidang perhubungan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat-diklat teknis dimaksud. Selanjutnya, untuk memperlancar tugas dinas seharusnya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), namun sampai saat ini belum terbentuk.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam lingkungan kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dan sangat mendukung pelaksanaan kinerja adalah :

a. Gedung

- 1) Gedung Kantor : 1 unit
- 2) Gedung Pelabuhan Penyeberangan : 1 unit
- 3) Gedung Pelabuhan Rakyat : 1 unit
- 4) Gedung Terminal dan Pos : 6 unit dan 4 unit
- 5) Gedung Ruang Tunggu VIP Bandara : 1 unit
- 6) Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor : 1 Unit

b. Kendaraan Dinas

- 1) Kendaraan Roda Empat : 2 unit
- 2) Kendaraan Roda Enam : 9 unit
- 3) Kendaraan Roda Dua : 7 unit

c. Fasilitas Kantor lainnya

- 1) Komputer : 19 unit
- 2) Laptop : 9 unit
- 3) Mesin Tik : 2 unit

- 4) Printer : 15 unit
- 5) Handy Talky : 25 unit
- 6) Telepon : 1 unit
- 7) Faksimile : 1 unit
- 8) Sejumlah meja, kursi dan lemari serta fasilitas lainnya

Untuk memperlancar kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar, perlu didukung dengan fasilitas alat pengujian yang memadai. Akan tetapi, pada Dinas Perhubungan belum tersedia.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dapat dilihat dari pencapaian kinerja sesuai komponen perencanaan strategis Tahun 2011-2016 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.5. terlampir :

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2011-2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tersaji pada table 2.6 terlampir:

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada saat ini masalah dalam sistem transportasi dalam wilayah Kabupaten Banggai semakin kompleks. Pertumbuhan jumlah penduduk yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi menuntut ketersediaan sistem transportasi yang mampu memberikan kenyamanan dan kualitas yang baik kepada masyarakat sebagai pengguna. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang tidak lagi hanya menyangkut tentang *supply* dan *demand*, tetapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan. Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal, konversi bahan bakar fosil ke gas dan sumber daya alternatif lainnya, *inteligensia transport management* serta kemajuan sarana dan prasarana perhubungan.

Adapun beberapa isu nasional yang mengemuka di bidang transportasi adalah :

1. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke efisiensi pergerakan.
2. Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, tingkat kemacetan dan polusi udara yang relatif tinggi, serta menurunnya daya saing sehingga tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan.
3. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha rendah, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas nasional.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, secara umum bidang transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut dihadapkan pada persoalan yang realistis

yaitu rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa :

1. Rendahnya nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten;
2. Belum optimalnya kemantapan jalan provinsi.
3. Belum optimalnya kondisi dan penataan terminal sebagai tempat pertukaran moda.
4. Tingginya pergerakan angkutan barang di Kabupaten Banggai, sementara jembatan timbang sebagai alat kontrol belum tersedia.

3.2. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai daerah yang berkembang Kabupaten Banggai memiliki potensi alam yang sangat kaya, daerah yang majemuk dengan beragam adat-istiadat merupakan salah satu unsur yang penting untuk sebuah daerah yang sedang dalam proses pembangunan.

Perwujudan Banggai yang aman dan damai, adil dan demokratis, sejahtera serta dihormati diantara sesama daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Proses penciptaan kondisi yang ideal ini harus dilakukan terus menerus, serta dilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas.

Dalam konteks ini, maka faktor kepemimpinan menjadi teramat penting. Pemimpin di Kabupaten Banggai perlu memberi contoh dalam bentuk kehidupan yang bersih, kepemimpinan yang berjalan dalam koridor konstitusi dan hukum, empati yang besar terhadap masyarakatnya, dan memberikan arahan serta keteladanan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mangacu pada program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka pemimpin terpilih harus dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Mendukung pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman dengan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, sehingga arus angkutan orang dan barang akan selaras dengan dukungan infrastruktur yang baik dan secara khusus mengarah pada wilayah atau lokasi yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan evaluasi hasil produksi yang terbaik dan asas pemerataan. Kondisi ini dapat

membuka kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak, kesejahteraan meningkat sehingga angka kemiskinan dapat ditekan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi.

2. Alokasi sumber pembiayaan dan anggaran pembangunan yang ada, dikonsentrasikan untuk menggerakkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan percepatan pertumbuhan perekonomian, pertanian dan kemaritiman yang bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong gerak perekonomian bagi masyarakat yang memberdayakan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan membuka peluang bagi para investor nasional maupun internasional untuk masuk namun tetap mengutamakan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat sehingga kebijakan yang diambil lebih menguntungkan kepentingan masyarakat (publik) secara umum.
4. Menjaga stabilitas daerah dengan berpegang teguh pada asas demokratis, saling menghormati antar sesama, tidak membedakan suku atau adat-istiadat sehingga tidak ada dominasi suatu suku tertentu. Membangun dan mengokohkan rumpun budaya yang telah ada sehingga tidak mudah terpecah belah.
5. Penataan pembangunan dan perbaikan infrastruktur tidak hanya dipusatkan di ibukota kabupaten, tetapi juga menyeluruh hingga ke pelosok desa, sehingga makna adil dan pemerataan bisa dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa-desa terpencil maupun desa perbatasan yang berdekatan dengan kabupaten atau provinsi lainnya.
6. Dapat merangkul seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi untuk berkerja bersama-sama, menyatukan pikiran untuk, saling menjaga dan mendukung serta menciptakan kerja cerdas guna mewujudkan Kabupaten Banggai yang maju dan sejahtera.

3.3. Telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan RI

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan RI

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan

transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance.

Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, ditetapkan tujuan Kementerian Perhubungan yaitu : Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Adapun sasaran dari visi kementerian perhubungan yaitu :

- a. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
- c. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
- e. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai suatu perkembangan yang diinginkan wilayah tersebut. Dalam pengembangan wilayah, ingin dicapai keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional/wilayah dalam satu kesatuan wilayah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah adalah sumber daya terbatas, tetapi kebutuhan banyak. Oleh karena itu, kita harus merencanakan ruang untuk mempertemukan kebutuhan dan keterbatasan. Dalam pengembangan wilayah, penataan ruang dapat memberikan intervensi untuk mengarahkan pengembangan wilayah sesuai/mendekati rencana yang diinginkan melalui rencana tata ruang.

Kabupaten Banggai adalah daerah yang saat ini banyak dilirik oleh para investor, karena kekayaan alam yang dimiliki. Sehingga banyak pendatang yang tiap tahun meningkat jumlahnya. Kecepatan pembangunan di Kabupaten Banggai meningkatkan lajunya peningkatan populasi tetapi tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten. Masalah yang tiap tahun dihadapi Kabupaten Banggai dan seolah belum mendapat jawaban dan penyelesaiannya adalah masalah pembenahan infrastruktur yaitu perbaikan drainase.

Di Kabupaten Banggai masalah banjir bahkan sudah menjadi ancaman rutin setiap tahun, buruknya drainase dan penebangan liar serta pembukaan lahan baru mengakibatkan hal ini terjadi. Banjir yang berulang-ulang sering merusak sarana dan prasarana yang ada. Mungkin sistem pengendalian masalah banjir sudah selayaknya dikaji kembali. Penyebab terjadinya hal tersebut antara lain adalah : pertama, rencana tata ruang kabupaten yang tidak sesuai dengan keadaan wilayah, sosial dan ekonomi. Kedua, penataan ruang saat ini masih banyak berupa planning paper ketimbang sebagai *planning management*.

Oleh sebab itu, perlunya tindakan nyata dan berkelanjutan untuk menghadapi masalah yang ada. Efektifitas sebagai instrumen pengelolaan menuju pembangunan berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk proses perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memperkirakan penataan ruang wilayah yang potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik.

Adapun rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor masih secara manual dan belum melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor menggunakan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standarisasi pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum selesainya pembangunan gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor - Belum tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah unit kendaraan bermotor yang wajib uji - potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) - ketersediaan tenaga ahli pengujian kendaraan bermotor
2	Pembangunan Infrastruktur Terminal	Kinerja sumber daya manusia aparatur perhubungan yang belum optimal sehingga mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas	Masih terbatasnya infrastruktur terminal Sehingga menjadi Kendala dalam meningkatkan pelayanan masyarakat	Tingginya tingkat Kepadatan lalu lintas pada jam atau waktu Tertentu Kapasitas jalan sudah mulai padat Adanya keterpaduan dengan Moda transportasi lain
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan transportasi perhubungan darat dan laut	-	Adanya lokasi yang belum tersedia sarana keselamatan transportasi perhubungan darat dan laut
4	Pembangunan Dermaga / Dermaga Kecil / Tambatan Perahu	-	-	Tersedianya lokasi / kondisi geografis yang mendukung pembangunan dermaga / tambatan perahu

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berikut adalah isu-isu strategis yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yaitu :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai meningkatkan kompetensi aparatur (sumber daya manusia) yang handal dan berkualitas di bidang perhubungan.
2. Diperlukan adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.
3. Diperlukan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.
4. Adanya pengelolaan dan pelayanan dibidang transportasi dan perhubungan yang prima, transparan dan terpercaya (akuntabilitas).

3.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam upaya mencari dan menentukan nilai-nilai strategis yang melekat pada suatu organisasi dapat dianalisis dengan menggunakan instrumen SWOT (*strenght, weakness, opportunities, threats*). Secara efektif analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Pengaruh internal dimaksud menyangkut kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh eksternal menyangkut peluang dan ancaman.

Berdasarkan gambaran kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, maka dapat diidentifikasi dan dianalisis beberapa faktor yang smerupakan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan Ancaman bagi perwujudan visi dan pengembangan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenghts*) :
 - a. Sumber daya aparatur yang ada.
 - b. Semangat, motivasi dan tanggung jawab staf cukup tinggi
 - c. Gedung, peralatan dan perlengkapan kerja cukup mendukung
 - d. Suasana kerja cukup mendukung.
2. Kelemahan (*Weakness*) :
 - a. Kuantitas personil belum seimbang dengan beban tugas.
 - b. Kualitas sumber daya aparatur (tenaga teknis) masih rendah.
 - c. Sarana dan prasarana pelayanan transportasi darat, laut, udara yang belum memadai.
 - d. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan jasa perhubungan.

3. Peluang (*Opportunities*) :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
 - b. Potensi Pendapatan daerah melalui pelayanan jasa di Bidang Perhubungan.
 - c. Adanya program pemerintah daerah untuk pengembangan sumber daya aparatur.
4. Ancaman (*Threats*) :
 - a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sarana transportasi karena semakin mahalnya suku cadang.
 - b. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut penyediaan jasa transportasi yang memadai.
 - c. Kewenangan di bidang perhubungan laut dan udara, sebagian besar masih berada didalam kewenangan pemerintah pusat.
 - d. Kurangnya pengembangan keterampilan dan keahlian sumber daya aparatur bidang perhubungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Di dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan, tujuan yang ingin dicapai adalah : meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan jasa di bidang perhubungan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal demi terwujudnya pelayanan jasa yang prima dengan tetap bersinergi dan berkoordinasi di dalam pelaksanaannya. Tujuan yang ingin dicapai tersebut merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penetapan tujuan tersebut didasarkan pada hasil analisis faktor penentu keberhasilan yang juga tetap memperhatikan keterkaitan dengan indikasi program di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, khususnya di bidang perhubungan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui kegiatan, tindakan atau aktifitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu jangka pendek. Secara jelas tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai selaras dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Dalam hal ini sasaran menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai secara nyata dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai merupakan beberapa cara teknis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Selanjutnya adalah penetapan kebijakan operasional yang dijabarkan di dalam program dan kegiatan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun, dan direncanakan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, dimana sebelum dilaksanakan perlu dievaluasi dengan berdasarkan kriteria umum relevansi, signifikansi, validitas, obyektifitas, ketepatan waktu dan kegunaan kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan. Kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan pada setiap tahun pembangunan selama periode lima tahun (2016-2021).

Secara jelas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dan uraian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. Terlampir

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun kerjasama dengan masyarakat, sebagai perwujudan lebih lanjut dari rencana yang secara umum telah ditetapkan besaran sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan indikatif lima tahunan yang terdiri dari 7 program rutin dan 6 program prioritas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Program Rutin, meliputi program :

2.09.01 Pelayanan administrasi perkantoran, meliputi kegiatan :

- 01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 01.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 01.22. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran.
- 01.29. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2.09.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi kegiatan :

- 02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 02.10. Pengadaan Meubeleur
- 02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 02.26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 02.42. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

2.09.03 Peningkatan disiplin aparatur, meliputi kegiatan :

- 03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 03.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- 03.04. Pengadaan Pakaian KORPRI
- 03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2.09.04 Fasilitas pindah/purna tugas PNS, meliputi kegiatan :

- 04.01. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

2.09.05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi kegiatan :

- 05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 05.05. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

2.09.06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, meliputi kegiatan :

- 06.01. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 06.05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
- 06.26. Penyusunan LAKIP

2.09.07 Pengembangan sistem informasi/data, meliputi kegiatan :

09.06. Penyusunan Profil SKPD

2. Program Prioritas, meliputi program :

2.09.15 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
meliputi kegiatan :

- 15.01. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 15.02. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
- 15.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.09.16 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, meliputi kegiatan :

- 16.04. Rehab/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

2.09.17 Peningkatan pelayanan angkutan, meliputi kegiatan :

- 17.01. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
- 17.05. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
- 17.14. Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
- 17.18. Penyuluhan Lapangan Tentang Keselamatan Pelayaran
- 17.20. Sosialisasi Jasa Travel Penerbangan

2.09.18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan,
meliputi kegiatan :

- 18.01. Pembangunan Gedung Terminal
- 18.02. Pembangunan Halte Bus/Taxi Gedung Terminal
- 18.07. Pengadaan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
- 18.08. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat
- 18.10. Pembangunan Dermaga Kecil/Tambatan Perahu

2.09.19 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas, meliputi kegiatan :

- 19.04. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan Raya
- 19.05. Pemeliharaan/Rutin/Berkala Peralatan Traffic Light

2.09.20 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, meliputi kegiatan :

- 20.01. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- 20.02. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- 20.03. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
- 20.04. Pengadaan Buku KIR Kendaraan
- 20.05. Pengadaan Plat Sampung Kendaraan
- 20.06. Pengadaan Plat KIR Kendaraan
- 20.07. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya/Sweeping

Berdasarkan kebijakan, program dan kegiatan yang dimaksudkan di atas, maka disusun Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai untuk periode lima tahun ke depan (2016-2021) yang dapat dilihat pada lampiran tabel 5.1.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ditampilkan dalam tabel berikut (Terlampir) :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang tujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung Visi dan misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur.

Mengingatnya eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perhubungan dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Banggai maka indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 7, dimana terbagi atas dua tabel yakni Tabel 7.1 yang menggambarkan Indikator sasaran strategis sebelum review sakin sementara untuk Tabel 7.2 Indikator sasaran strategis telah disesuaikan dengan Sakip Review (Terlampir).

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai periode tahun 2016-2021, merupakan acuan dinas dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan untuk lima tahun ke depan. Pada pelaksanaan program-program yang ada, akan dirinci lebih detail setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan sumber-sumber pembiayaan baik dari APBD, maupun Dana Dekonsentrasi dan APBN yang akan disajikan dalam bentuk program tahunan (lampiran tabel 5.1.).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai sebagai dinas pelaksana teknis daerah dalam mengoperasikan tugas dan fungsinya secara konsisten tetap mengacu pada kebijakan daerah, yang tertuang pada dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten sehingga penyusunan RENSTRA dinas ini yang merupakan arah aktivitas, program dan kegiatan tahunan dinas, tetap merujuk atau mempunyai keterkaitan pada kebijakan tersebut khususnya pada lingkup bidang perhubungan.

Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai terdapat dua sektor yang diemban dalam misi dinas yaitu perhubungan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak melibatkan berbagai pihak yang terkait melalui koordinasi dan kerjasama lintas dinas, sehingga untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program yang ada diperlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari para stakeholders.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan keterkaitan struktural maupun fungsional dari para stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan dan program, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Kiranya secara bersama-sama dapat berperan aktif untuk mewujudkannya, karena tugas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Kabupaten Banggai secara keseluruhan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Tabel - Tabel
2. Matriks Program dan Kegiatan Indikatif Lima Tahunan